

## Penerapan Sila Ketiga dalam Menangani Kasus Perbedaan Suku, Ras, dan Budaya yang Ada di Indonesia

Rifdabella Alifthania Andiani<sup>1</sup>, Rahma Dhania Aulia Vega<sup>2</sup>, Lailatul Udhmah<sup>3</sup>, Muhammad Fajar Rizky Atmaja<sup>4</sup>, Ayus Devika Agustina<sup>5</sup>, Yelse Berthilda Valencia Clearesta<sup>6</sup>, Mya Puspita<sup>7</sup>, Salwa Nabila Arifin<sup>8</sup>, Nadya Vania Rahma<sup>9</sup>, Maftuhin Naim<sup>10</sup>

Program Studi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soeperagen Malang, Jalan S. Supriadi No. 22, Kota Malang, Jawa Timur 65147, Indonesia

[alifthaniaa@gmail.com](mailto:alifthaniaa@gmail.com) [rahmaauliadhaniaa@gmail.com](mailto:rahmaauliadhaniaa@gmail.com) [laylaudmh18@gmail.com](mailto:laylaudmh18@gmail.com)

[atmajafajarrizky22@gmail.com](mailto:atmajafajarrizky22@gmail.com) [devikaayus6@gmail.com](mailto:devikaayus6@gmail.com) [yelsebrthildav.c@gmail.com](mailto:yelsebrthildav.c@gmail.com)

[puspitamyala13@gmail.com](mailto:puspitamyala13@gmail.com) [nadyavania917@gmail.com](mailto:nadyavania917@gmail.com) [Gatotperkasa92@gmail.com](mailto:Gatotperkasa92@gmail.com) [nsalwa788@gmail.com](mailto:nsalwa788@gmail.com)

**Abstract:** Indonesia is a nation of high diversity encompassing ethnicities, races, cultures, and religions. However, such diversity often serves as a source of conflict if not managed properly. This article examines the application of the third principle of Pancasila, "Unity of Indonesia," in addressing conflicts rooted in differences. Using a qualitative descriptive literature approach, the study highlights the strategic role of unity values in conflict prevention and fostering social harmony. An analysis of the Ambon conflict, Dayak-Madura conflict, and Papua conflict reveals that lack of dialogue, social inequality, and discrimination are key obstacles in implementing the third principle. The findings emphasize that multicultural education, cross-cultural dialogue, and inclusive policies can serve as effective solutions to strengthen unity amid diversity. This article underscores the importance of collective commitment to internalizing unity values in daily life.

**Keywords:** Pancasila, third principle, unity, diversity, social conflict

**Abstrak:** Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman tinggi yang mencakup suku, ras, budaya, dan agama. Namun, keberagaman ini sering kali menjadi pemicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Artikel ini mengkaji penerapan sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," dalam menangani konflik perbedaan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif kepustakaan, artikel ini mengidentifikasi peran nilai-nilai persatuan dalam mencegah konflik serta mendorong harmoni sosial. Studi terhadap konflik Ambon, konflik Dayak-Madura, dan konflik di Papua menunjukkan bahwa kurangnya dialog, ketimpangan sosial, dan diskriminasi menjadi hambatan utama dalam penerapan sila ketiga. Hasil kajian ini menegaskan bahwa pendidikan multikultural, dialog lintas budaya, dan kebijakan inklusif dapat menjadi solusi untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Artikel ini menegaskan pentingnya komitmen kolektif untuk menginternalisasi nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata kunci:** Pancasila, sila ketiga, persatuan, keberagaman, konflik sosial

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman suku, ras, dan budaya yang sangat kaya. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat lebih dari 1.340 suku bangsa dengan keunikan adat istiadat, bahasa, dan tradisi masing-masing. Keanekaragaman ini merupakan potensi luar biasa yang seharusnya menjadi kekuatan dalam membangun kesatuan dan persatuan bangsa (Eriani et al., 2023). Namun, di sisi lain, perbedaan ini juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan bijak. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan suku, ras, dan budaya sering kali memicu konflik horizontal yang berdampak pada stabilitas sosial dan politik negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan tersebut.

Salah satu landasan utama dalam membangun harmoni sosial di Indonesia adalah Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu “Persatuan Indonesia.” Sila ini menegaskan pentingnya persatuan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, masyarakat Indonesia diharapkan mampu mengelola perbedaan secara positif dan menjadikannya sebagai modal sosial dalam membangun negara yang maju dan sejahtera. Penerapan sila ketiga menjadi sangat relevan dalam upaya menangani kasus-kasus perbedaan suku, ras, dan budaya yang masih terjadi hingga saat ini.

Kajian literatur sebelumnya menunjukkan bahwa banyak peneliti telah membahas pentingnya Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Misalnya, penelitian oleh Atqiya et al. (2024) mengungkapkan bahwa sila ketiga Pancasila memiliki peran dalam menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman. Studi ini menyoroti bagaimana nilai-nilai persatuan dapat diinternalisasi melalui pendidikan dan kebijakan publik. Penelitian lain oleh Hasan et al. (2024) menekankan pentingnya suatu hal dalam menangani konflik suku dan ras. Hasan dkk. mengusulkan agar pemerintah memperkuat program-program yang mendukung dialog lintas budaya sebagai upaya mencegah eskalasi konflik.

Namun, kajian-kajian tersebut cenderung bersifat konseptual dan kurang memberikan panduan praktis dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, di masyarakat. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi peran sila ketiga dalam penanganan kasus-kasus perbedaan suku, ras, dan budaya. Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada analisis aplikatif terhadap penerapan sila ketiga dalam nyata di masyarakat. Artikel ini juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai persatuan dengan pendekatan-pendekatan praktis yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial.

Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam artikel ini adalah bagaimana penerapan sila ketiga Pancasila dapat menjadi solusi efektif dalam menangani permasalahan yang muncul akibat perbedaan suku, ras, dan budaya di Indonesia. Wilayah pengabdian yang menjadi fokus pembahasan adalah masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman tinggi, seperti daerah perbatasan, wilayah perkotaan, atau daerah-daerah konflik. Dalam hal ini, diperlukan strategi yang tidak hanya menekankan pada aspek normatif, tetapi juga pada pendekatan praktis yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan sila ketiga Pancasila dapat menjadi instrumen efektif dalam menangani kasus-kasus perbedaan suku, ras, dan budaya. Artikel ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya membangun persatuan di tengah keberagaman, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih harmonis dan inklusif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertumpu pada kajian kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena secara mendalam, khususnya terkait penerapan sila ketiga Pancasila dalam menangani perbedaan suku, ras, dan budaya di Indonesia. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk mengeksplorasi nilai-nilai filosofis dan aplikasinya dalam kehidupan sosial

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerapan sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia,” memiliki peran dalam menangani kasus-kasus perbedaan suku, ras, dan budaya. Berdasarkan hasil analisis terhadap literatur terdahulu, yakni:

1. Nilai utama dalam sila ketiga adalah pengakuan terhadap keberagaman dan upaya membangun kesatuan di tengah perbedaan. Pancasila tidak hanya mengajarkan toleransi, tetapi juga menekankan pentingnya kerja sama antar kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam hal ini, sila ketiga menjadi dasar filosofis untuk mendorong rasa kebangsaan dan memperkuat identitas nasional.
2. Literatur menunjukkan bahwa konflik suku, ras, dan budaya di Indonesia sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai persatuan. Sebagai contoh, konflik di Ambon (1999–2002) dan konflik etnis di Kalimantan Barat (1997–1999) mengungkapkan bahwa ketegangan antarkelompok dapat meningkat karena isu primordial, diskriminasi, dan ketimpangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai persatuan belum sepenuhnya terinternalisasi di masyarakat.
3. Temuan juga menunjukkan bahwa penerapan sila ketiga memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak. Strategi seperti dialog lintas budaya, pendidikan multikultural, dan program pembangunan komunitas terbukti efektif dalam meredakan konflik dan membangun hubungan harmonis di masyarakat. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung inklusi sosial, seperti penguatan otonomi daerah dan program toleransi, juga memberikan kontribusi.

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keberagaman tertinggi di dunia. Terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, bangsa ini menjadi rumah bagi lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Selain itu, terdapat sekitar 742 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Faktor geografis yang luas, sejarah kolonialisme, serta dinamika migrasi turut membentuk keragaman ini. Dengan realitas ini, keberagaman di Indonesia bukan hanya soal identitas budaya, melainkan juga mencakup agama, kepercayaan, adat istiadat, dan sistem nilai yang berbeda-beda.

Keberagaman ini memiliki dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi, keberagaman adalah kekayaan bangsa yang dapat menjadi modal besar dalam pembangunan. Tradisi lokal, seni, budaya, dan bahasa adalah aset yang tidak ternilai harganya. Namun, di sisi lain, keberagaman juga menjadi tantangan dalam menciptakan persatuan. Ketegangan, diskriminasi, hingga konflik suku, ras, dan agama adalah risiko nyata jika keberagaman tidak dikelola dengan baik. Keberagaman Indonesia telah menjadi kekuatan dalam perjuangan kemerdekaan. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" menjadi prinsip dasar dalam membangun kesatuan di tengah perbedaan. Namun, implementasi prinsip ini tidak selalu mudah, terutama dalam menghadapi dinamika sosial-politik yang terus berubah.

Keberagaman juga tercermin dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana otonomi daerah diberlakukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat lokal mengatur wilayahnya sesuai dengan adat dan tradisi masing-masing. Namun, pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki tantangan tersendiri, seperti potensi munculnya diskriminasi terhadap kelompok minoritas di tingkat lokal. Dalam hal ini, penerapan sila ketiga Pancasila menjadi sangat penting sebagai panduan dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman.

Namun, keberagaman tidak hanya soal adat atau tradisi, melainkan juga mencakup identitas politik dan sosial. Perbedaan dalam pola pikir, aspirasi politik, serta sistem nilai sering kali menjadi penyebab munculnya ketegangan. Dalam hal ini, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga menjadi pedoman dalam mengelola keberagaman agar tidak menjadi sumber konflik.

Berbagai kasus konflik perbedaan suku, ras, dan budaya yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya celah dalam penerapan nilai-nilai persatuan. Konflik-konflik ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana keberagaman dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik.

1. Konflik Ambon (1999–2002)

Salah satu contoh konflik perbedaan yang menonjol adalah konflik di Ambon, Maluku, yang terjadi antara tahun 1999 hingga 2002. Konflik ini melibatkan ketegangan antara dua kelompok agama, yaitu Muslim dan Kristen, yang awalnya dipicu oleh permasalahan sosial ekonomi. Namun, konflik ini berkembang menjadi kekerasan sektarian yang melibatkan ribuan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Analisis terhadap konflik ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai persatuan menjadi salah satu penyebab utama eskalasi kekerasan. Ketegangan yang sudah lama terpendam akibat ketimpangan sosial dan ekonomi akhirnya memicu konflik besar. Selain itu, faktor politik lokal dan kurangnya kepercayaan antar kelompok juga memperburuk situasi. Dalam hal ini, nilai-nilai sila ketiga Pancasila seharusnya menjadi pedoman untuk mencegah konflik. Dialog lintas agama, pendidikan toleransi, dan kebijakan yang adil dapat menjadi solusi untuk membangun kembali kepercayaan antar kelompok. Meski upaya rekonsiliasi telah dilakukan pasca konflik, tantangan dalam membangun harmoni sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

2. Konflik Dayak-Madura di Kalimantan Barat (1997–1999)

Konflik lain yang menjadi sorotan adalah bentrokan antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Barat. Konflik ini melibatkan kekerasan etnis yang dipicu oleh persaingan sosial dan ekonomi antara penduduk asli Dayak dan pendatang Madura. Ketegangan ini berakar dari perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Dayak terhadap kebijakan transmigrasi yang dianggap mengurangi akses mereka terhadap sumber daya lokal. Bentrokan ini mencerminkan bagaimana perbedaan etnis dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Kurangnya dialog antar kelompok dan kebijakan yang kurang sensitif terhadap isu lokal menjadi penyebab utama konflik ini. Dalam hal ini, penerapan sila ketiga yang menekankan nilai-nilai persatuan menjadi sangat relevan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak meminggirkan kelompok tertentu dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

3. Konflik di Papua

Papua adalah wilayah lain di Indonesia yang sering kali menjadi sorotan terkait isu perbedaan. Konflik di Papua tidak hanya melibatkan ketegangan antara penduduk lokal

dengan pemerintah, tetapi juga antar kelompok masyarakat di wilayah tersebut. Faktor ketimpangan pembangunan, diskriminasi, dan eksploitasi sumber daya alam menjadi pemicu utama konflik. Penerapan sila ketiga Pancasila di Papua memerlukan pendekatan yang komprehensif. Selain memperkuat dialog lintas budaya, pemerintah juga perlu meningkatkan pembangunan di wilayah tersebut agar kesenjangan sosial dan ekonomi dapat diatasi. Nilai-nilai persatuan harus ditanamkan melalui program pendidikan, kampanye sosial, dan kebijakan yang mendukung inklusi sosial.

Dari berbagai kasus konflik di atas, terdapat beberapa faktor utama yang sering menjadi pemicu, yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi, diskriminasi dan stigmatisasi, serta pengaruh politik. Nilai-nilai sila ketiga Pancasila, seperti kebersamaan, solidaritas, dan penghormatan terhadap perbedaan, menjadi pentinasyarat dalam mengatasi konflik suku, ras, dan budaya. Implementasi nilai-nilai ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi sosial.

Dalam konflik Ambon, misalnya, dialog lintas agama dapat menjadi sarana untuk membangun kembali kepercayaan antar kelompok. Sementara itu, di Papua, kebijakan pembangunan yang adil dan inklusif dapat membantu mengatasi ketimpangan sosial. Strategi ini harus didukung oleh pendidikan multikultural yang menanamkan nilai-nilai persatuan sejak dini.

Selain itu, peran media juga sangat penting dalam membangun narasi yang positif tentang keberagaman. Kampanye yang menonjolkan keberagaman sebagai kekuatan bangsa dapat membantu mengurangi stereotip dan prasangka. Dengan demikian, penerapan sila ketiga tidak hanya menjadi solusi untuk mencegah konflik, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sila ketiga memerlukan strategi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial. Berikut adalah beberapa hal yang dapat diimplementasikan:

1. Dialog lintas budaya

Dialog lintas budaya merupakan salah satu cara efektif untuk membangun pemahaman dan kepercayaan antarkelompok. Program ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, kegiatan seni dan budaya, serta program pertukaran antar m.

2. Pendidikan multikultural

Pendidikan berperan dalam membangun kesadaran akan pentingnya persatuan. Kurikulum sekolah dapat dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Selain itu, pelatihan bagi guru juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu-isu keberagaman.

3. Kebijakan inklusif

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung inklusi sosial. Misalnya, program pembangunan komunitas yang melibatkan berbagai kelompok etnis dan budaya dapat membantu menciptakan rasa memiliki dan solidaritas. Selain itu, penguatan otonomi daerah juga dapat menjadi langkah untuk mengakomodasi perbedaan lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional.

4. Media sebagai sarana edukasi

Media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan persatuan. Kampanye yang menonjolkan keberagaman sebagai kekuatan bangsa dapat membantu mengurangi stereotip dan prasangka.

Penerapan sila ketiga masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya resistensi terhadap perubahan, terutama di kalangan masyarakat yang masih memegang teguh

nilai-nilai primordial. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi juga menjadi hambatan dalam menciptakan harmoni sosial.

Tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan konsistensi antara nilai-nilai yang diajarkan dengan praktik nyata di lapangan. Sebagai contoh, meskipun pendidikan multikultural telah diterapkan, masih sering terjadi diskriminasi dalam dunia pendidikan maupun di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak untuk mengatasi tantangan ini.

Di era globalisasi dan digitalisasi, relevansi sila ketiga menjadi semakin penting. Arus informasi yang cepat dan masif dapat memperkuat persatuan, tetapi juga berpotensi menimbulkan disintegrasi apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam hal ini, sila ketiga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan modern, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi. Penerapan sila ketiga juga relevan dalam memperkuat identitas nasional di tengah pengaruh budaya asing. Melalui penguatan nilai-nilai persatuan, masyarakat Indonesia dapat tetap menjaga keutuhan bangsa tanpa kehilangan jati dirinya.

## KESIMPULAN

Penerapan sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia,” memiliki peran dalam menangani perbedaan suku, ras, dan budaya di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini menekankan pentingnya solidaritas, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, nilai-nilai ini menjadi landasan filosofis yang sangat relevan untuk menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman.

Namun, berbagai kasus konflik perbedaan yang telah terjadi menunjukkan bahwa implementasi sila ketiga masih menghadapi tantangan besar. Konflik Ambon, konflik Dayak-Madura, dan konflik di Papua mengungkapkan bagaimana ketimpangan sosial, kurangnya dialog antar kelompok, serta diskriminasi dapat memicu ketegangan. Oleh karena itu, nilai persatuan perlu diinternalisasi melalui pendekatan sistematis, seperti pendidikan multikultural, kebijakan, dan dialog lintas budaya.

Meskipun tantangan ini tidak sederhana, sila ketiga Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah perubahan sosial dan globalisasi. Dengan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial, nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga dapat diimplementasikan secara nyata untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Keberagaman yang dikelola dengan bijak akan menjadi aset besar bagi Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adib, I. A., Al-Kautsar Ridho, M., & Saputri, E. F. (2023). Implementasi makna nilai Pancasila sila ke-3. *Indigenous Knowledge*, 2(5), 375–380.
- Ashfiya, N. A., Nasoha, A. M. M., Syuhada, R. P. U., Natasyah, R. U., & Darrohmah, S. A. (2024). Pancasila sebagai sistem etika, etika kehidupan berbangsa, dan perlunya Pancasila sebagai sistem etika. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial, dan Administrasi Negara*, 1(4), 72–80.
- Budi, B., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). Strategi pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai persatuan Indonesia dalam mengatasi konflik berbangsa dan bernegara dari perspektif strategi perang semesta. *Strategi Perang Semesta*, 7(2), 85–98.
- Devy Eriani, E., Susanti, R., & Meilinda, M. Pd. (2023). Hubungan penerapan Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila dengan profil pelajar Pancasila. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(1), 25–37.

- Fakhri Alhafizh, M., Effendi, C., Musthofa, R. F., & Najmura, T. A. (2021). Kaitan silih asih, silih asah, dan silih asuh dengan sila ke-3 Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 671–680.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., & Syahputra, M. F. (2024). Paradigma Bhineka Tunggal Ika dan implikasinya dalam menangani tawuran antar kelompok. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3), 1–14.
- Kardiman, T. (2024). Sila ketiga Pancasila fondasi dalam menyukkseskan demokrasi inklusif (sebagai upaya menangkal politik identitas). *Sovereignty*, 3(1), 16–29.